



**EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT DPRD DALAM  
MENDUKUNG FUNGSI LEGISLASI, PENGANGGARAN, DAN  
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.  
KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT**

*Evaluation of The Performance of The DPRD Secretariat in Supporting  
the Legislation, Budgeting, and Supervision Functions of The Regional  
People's Representative Council, Teluk Bintuni Regency, West Papua  
Province*

**Charlos Guntur Maay<sup>\*1</sup>, Muhammad Irvan Nur' Iva<sup>2</sup>, Rahayu<sup>3</sup>, H. Heman  
H<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Makassar, Indonesia

<sup>\*1</sup>Email: maaycharlos@gmail.com

<sup>2</sup>Email: irvan.nuriva@unm.ac.id, rahayu@unm.ac.id

<sup>3</sup>Email: hermandody@unm.ac.id

**Abstract**

*This study aims to evaluate the performance of the Teluk Bintuni Regency DPRD Secretariat in providing administrative, technical, and substantive support to optimize the implementation of the legislative, budgeting, and oversight functions of the Regional People's Representative Council (DPRD). The study uses a descriptive qualitative approach with an interactive analysis model by Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, which includes data reduction, data presentation, and drawing and verifying conclusions. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observations, and documentation studies with the application of triangulation to ensure the validity of the findings. The results of this study indicate that the DPRD Secretariat has normatively carried out its administrative and technical functions in accordance with applicable regulations. However, the effectiveness of institutional support still faces obstacles in the aspects of human resource capacity, optimization of administrative digitalization, and integration of financial data systems and trial documentation. Strengthening the Public Financial Management (PFM) system, improving apparatus competency, and modernizing information systems are priority strategies in improving the quality of support for the implementation of DPRD functions. This study contributes to the development of public administration studies through the integration of regulatory perspectives, organizational effectiveness theory, and public sector performance management in the analysis of regional legislative institutions.*

**Keywords:** *performance effectiveness, DPRD Secretariat, legislative function, public financial management, public management*

**Abstrak**

*Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan substantif guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi penganggaran, serta fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model analisis interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan*

*dan verifikasi kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan penerapan triangulasi untuk menjamin validitas temuan. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa secara normatif Sekretariat DPRD telah menjalankan fungsi administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Namun demikian, efektivitas dukungan kelembagaan masih menghadapi kendala pada aspek kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi digitalisasi administrasi, serta integrasi sistem data keuangan dan dokumentasi persidangan. Penguatan sistem Public Financial Management (PFM), peningkatan kompetensi aparatur, serta modernisasi sistem informasi menjadi strategi prioritas dalam meningkatkan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik melalui integrasi perspektif regulatif, teori efektivitas organisasi, dan manajemen kinerja sektor publik dalam analisis kelembagaan legislatif daerah.*

**Kata Kunci:** *efektivitas kinerja, Sekretariat DPRD, fungsi legislasi, public financial management, manajemen publik*

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD menjalankan tiga fungsi pokok, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah (legislasi), fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi perangkat utama dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD merupakan indikator penting kualitas governance di tingkat daerah.

Pelaksanaan fungsi tersebut tidak terlepas dari dukungan teknis dan administratif yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Dari sudut pandang normatif, Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan administrasi keuangan dan kesekretariatan, mendukung pelaksanaan tugas DPRD, serta menawarkan bantuan dari tenaga ahli. Posisi ini dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Perangkat Daerah yang menempatkan Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah dengan ciri khas tertentu: secara administratif, bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah, namun secara fungsional melayani DPRD. Posisi dualistik ini menuntut kapasitas manajerial, profesionalisme aparatur, dan sistem kerja yang efektif agar dukungan terhadap DPRD berjalan optimal.

Dalam perspektif administrasi publik, efektivitas organisasi ditentukan oleh kemampuan institusi dalam mengelola sumber daya untuk meraih sasaran yang telah ditentukan. Richard M. Steers (1985) menekankan bahwa keberhasilan pencapaian sasaran organisasi ditentukan oleh koordinasi di dalam, pengintegrasian sumber daya, dan kejelasan dalam sistem kerja. Di sisi lain, teori sistem organisasi yang diajukan oleh Daniel Katz dan Robert L. Kahn (1978) melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang terdiri dari subsistem yang saling berkaitan. Dalam konteks ini, DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan dua subsistem yang tidak terpisahkan; kelemahan dukungan administratif berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Sejalan dengan paradigma reformasi administrasi publik, pendekatan New Public Management yang diperkenalkan oleh Christopher Hood (1991) menekankan pentingnya orientasi kinerja, efisiensi, dan akuntabilitas dalam sektor publik. Reformasi manajemen publik modern juga menggarisbawahi perlunya integrasi antara sistem administrasi dan capaian output kebijakan (Pollitt & Bouckaert, 2017). Dengan demikian, efektivitas Sekretariat DPRD tidak cukup diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kualitas produk legislasi, ketepatan penganggaran, serta optimalisasi fungsi pengawasan DPRD.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dukungan Sekretariat DPRD berpengaruh terhadap kinerja lembaga legislatif daerah. Namun, sebagian besar kajian masih bersifat normatif-administratif dan belum mengintegrasikan perspektif manajemen kinerja serta reformasi administrasi publik secara komprehensif. Padahal, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai masalah seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi dan dokumentasi yang belum berfungsi secara maksimal, serta lemahnya integrasi dalam pengelolaan keuangan. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma yang diatur dan kenyataan yang terjadi.

Dalam konteks Kabupaten Teluk Bintuni, dinamika tersebut menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam mengingat masyarakat kini semakin menuntut agar lembaga legislatif daerah terlihat lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Memperkuat kemampuan Sekretariat DPRD menjadi hal penting untuk memastikan fungsi perwakilan politik dan pengawasan terhadap kebijakan daerah berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti seberapa baik kinerja yang ada. Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut dalam perspektif manajemen kinerja sektor publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis regulatif, teori efektivitas organisasi, dan pendekatan manajemen publik modern dalam mengkaji kelembagaan legislatif daerah. Dengan cara ini, studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan studi administrasi publik serta kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola Sekretariat DPRD di tingkat daerah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan cara kualitatif dengan desain deskriptif untuk memeriksa dengan detail seberapa efektif kinerja Sekretariat DPRD dalam membantu tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami arti, proses, dan perkembangan organisasi dalam konteks administrasi publik. Menurut John W. Creswell, (2014) penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan serta konteks yang melatarbelakanginya.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, selama kurang lebih tiga bulan yang mencakup tahap pengumpulan, reduksi, analisis, dan penyajian data. Pemilihan lokasi

didasarkan pada pertimbangan relevansi permasalahan penelitian, khususnya terkait efektivitas dukungan administratif dan teknis terhadap fungsi DPRD.

Penelitian ini memakai cara kualitatif dengan rancangan yang bersifat deskriptif-analitis untuk mempelajari dengan lebih mendalam. efektivitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Pendekatan yang bersifat kualitatif dipilih karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami arti, langkah-langkah, dan perkembangan dalam lembaga. konteks administrasi publik. Sebagaimana dikemukakan oleh John W. Creswell, penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi fenomena sosial secara kontekstual berdasarkan perspektif partisipan.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, selama kurang lebih tiga bulan yang mencakup tahap pengumpulan data, analisis, hingga verifikasi temuan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan relevansi permasalahan, khususnya terkait dukungan administratif dan teknis terhadap pelaksanaan fungsi DPRD.

Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi efektivitas kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan terhadap: 1) Fungsi Legislasi, meliputi fasilitasi administrasi dan dukungan teknis dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda); 2) Fungsi Anggaran, mencakup dukungan dalam pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD serta pengelolaan administrasi keuangan DPRD; 3) Fungsi Pengawasan, berupa penyediaan data, dokumentasi, serta fasilitasi kegiatan monitoring kebijakan pemerintah daerah. Efektivitas dianalisis berdasarkan dimensi pencapaian tujuan, kualitas dukungan administratif, efisiensi proses, serta kontribusi terhadap kinerja kelembagaan DPRD.

Penelitian ini melibatkan sepuluh orang kunci yang dipilih dengan cara purposive sampling, yaitu memilih orang-orang secara sadar berdasarkan jabatan yang relevan, pengalaman, dan keterlibatan mereka langsung dalam tugas yang dilakukan oleh DPRD. Jumlah dan posisi dari para informan adalah: 1) Sekretaris DPRD 1 orang; 2) Kepala Bagian (Persidangan, Keuangan, Umum dan Humas) 3 orang; 3) Staf Pelaksana Sekretariat 3 orang dan Anggota DPRD 3 orang. Pemilihan informan dari unsur Sekretariat dan DPRD dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif, baik sebagai penyedia maupun pengguna layanan administratif.

Penelitian ini memakai dua tipe sumber data: 1) Data Utama, yang didapatkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan. terhadap aktivitas administrasi, persidangan, dan pembahasan kebijakan; 2) Data Sekunder, berupa dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, laporan kinerja (LAKIP), notulen rapat, dokumen persidangan, serta dokumen APBD dan produk hukum daerah.

Analisis data menggunakan metode analisis interaktif yang dibuat oleh Matthew B. Miles dan Michael Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama: 1) Pengurangan Data, yaitu tahap memilih dan menyederhanakan data sesuai dengan tujuan penelitian; 2) Penyampaian Data, dalam bentuk cerita analitis dan tabel tema untuk memudahkan pemahaman; 3) Pengambilan Kesimpulan dan Pemeriksaan,, dilakukan secara bertahap dan berulang untuk memastikan konsistensi antara temuan empiris dan kerangka teori.

Proses analisis dilakukan secara simultan sejak tahap awal pengumpulan data hingga diperoleh pola dan hubungan antarvariabel yang menjelaskan efektivitas kinerja Sekretariat DPRD.

Untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini dapat dipercaya dan sah, kami menggunakan cara untuk memeriksa keabsahan data seperti yang dijelaskan oleh Lexy J. Moleong, yang meliputi: 1) Triangulasi Sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai orang yang memberi tahu; 2) Triangulasi Metode, yaitu dengan menguji kesesuaian data dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen; 3) Kreabilitas Data, yaitu memastikan hasil penafsiran kepada sumber informasi untuk mengetahui apakah makna yang didapat itu benar. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan derajat kepercayaan (*credibility*) serta ketepatan interpretasi hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas Dukungan terhadap Fungsi Legislasi

Efektivitas organisasi secara klasik dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Richard M. Steers (1985) efektivitas organisasi dapat dilihat dari tiga tanda penting: mencapai sasaran, keterpaduan di dalam, dan penyesuaian terhadap lingkungan.

Jika dikaitkan dengan temuan penelitian, efektivitas Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dalam mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan menunjukkan: 1) Pencapaian Tujuan: Secara administratif, dukungan terhadap persidangan dan pembahasan RAPBD berjalan sesuai jadwal. Namun, pada aspek kualitas dukungan substantif (misalnya penyediaan bahan analisis kebijakan), masih terdapat keterbatasan sumber daya; 2) Integrasi Internal: Koordinasi antarbagian relatif berjalan baik, tetapi belum sepenuhnya terstandarisasi dalam SOP yang terdokumentasi secara sistematis; 3) Adaptasi Lingkungan: Sekretariat telah menyesuaikan diri dengan dinamika regulasi dan kebutuhan DPRD, tetapi belum optimal dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif Steers, efektivitas kelembagaan berada pada kategori cukup efektif, tetapi belum mencapai efektivitas optimal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari kesesuaian prosedural, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan responsivitas terhadap tuntutan lingkungan (Megah & Valiant, 2025; Salamatul Afiyah, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni telah menjalankan fungsi fasilitasi legislasi melalui penyediaan bahan persidangan, penyusunan risalah rapat, pengelolaan dokumen Ranperda, serta koordinasi tenaga ahli. Secara prosedural, mekanisme tersebut telah berjalan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Meskipun begitu, efektivitas dukungan legislasi tidak sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang teridentifikasi meliputi keterbatasan kapasitas analisis kebijakan, belum terintegrasinya sistem dokumentasi digital, serta ketergantungan pada pola kerja administratif konvensional. Kondisi ini berdampak pada lamanya proses penyediaan dokumen dan kurang optimalnya dukungan substantif terhadap pembahasan Ranperda.

Secara teoretis, efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers (1985) ditentukan oleh kemampuan institusi mengintegrasikan sumber daya untuk

mencapai tujuan. Dalam konteks ini, dukungan administratif belum sepenuhnya bertransformasi menjadi dukungan substantif berbasis analisis kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seberapa baik undang-undang bekerja tidak hanya tergantung pada seberapa lengkap sistem administrasinya, tetapi juga pada seberapa baik bantuan dari para ahli yang mendukungnya yang diberikan Sekretariat. Implikasinya, penguatan kapasitas analisis regulasi dan digitalisasi manajemen dokumen menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas produk legislasi daerah. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Administrasi Publik* menegaskan bahwa efektivitas organisasi sektor publik tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi dari kemampuan menghasilkan output dan outcome yang berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan (Pratama & Widodo, 2021).

Temuan ini sejalan dengan kondisi Sekretariat DPRD yang secara administratif berjalan baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek dukungan substantif terhadap fungsi DPRD. Menurut penelitian dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, kapasitas kelembagaan sekretariat legislatif berpengaruh signifikan terhadap kualitas peraturan daerah, terutama dalam aspek harmonisasi dan penyusunan naskah akademik (Sari, 2022). Dengan demikian, keterbatasan tenaga analisis kebijakan dapat memengaruhi kualitas produk legislasi daerah.

### **Efektivitas Dukungan terhadap Fungsi Anggaran**

Dalam perspektif administrasi publik modern, kinerja organisasi Tidak hanya ditentukan oleh hasil administrasi, tetapi juga oleh seberapa baik pelayanan yang diberikan dan tanggung jawab yang diambil. Osborne dan Gaebler dalam bukunya yang berjudul *Reinventing Government* menekankan bahwa lembaga-lembaga pemerintah seharusnya fokus pada hasil yang dicapai, bukannya cuma mengikuti langkah-langkah yang ada.

Sekretariat DPRD telah menjalankan fungsi administratif sesuai prosedur formal. Namun orientasi hasil (outcome) belum sepenuhnya terukur melalui indikator kinerja berbasis dampak terhadap kualitas fungsi DPRD. Artinya, secara prosedural organisasi sudah berjalan, tetapi secara outcome-based governance masih perlu penguatan, terutama dalam: 1) Sistem evaluasi kinerja internal; 2) Indikator keberhasilan berbasis dampak kebijakan.

Dalam mendukung fungsi anggaran, Sekretariat DPRD berperan dalam memfasilitasi pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, serta pengelolaan anggaran internal DPRD. Secara administratif, sistem perencanaan dan pelaporan telah mengikuti kerangka regulasi nasional, termasuk ketentuan yang harus dipahami ketentuan Undang-Undang 12 Tahun 2019 mengenai Manajemen Keuangan Daerah. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa integrasi data keuangan antarbagian belum sepenuhnya optimal. Digitalisasi sistem keuangan masih terbatas, dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan berbasis kinerja masih perlu ditingkatkan.

Hal ini berdampak pada efektivitas dukungan terhadap fungsi pengawasan fiskal DPRD. Dalam perspektif manajemen publik modern, paradigma *New Public Management* yang diperkenalkan oleh Christopher Hood (1991) menekankan pentingnya efisiensi, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas hasil. Dukungan anggaran yang efektif tidak hanya bersifat administratif-prosedural, tetapi harus mampu menyediakan data yang akurat dan analitis untuk memperkuat fungsi kontrol DPRD terhadap eksekutif.

Dengan demikian, penguatan *Public Financial Management* (PFM) di lingkungan Sekretariat DPRD menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan legislatif daerah. Studi dalam *Jurnal Keuangan dan Kebijakan Publik* menunjukkan bahwa penguatan sistem *Public Financial Management* (PFM) di lingkungan legislatif daerah meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan anggaran dan transparansi fiskal (Hidayat & Kurniawan, 2023). Hal ini memperkuat argumentasi bahwa modernisasi sistem keuangan Sekretariat DPRD menjadi kebutuhan strategis. Studi dalam *Jurnal Manajemen Publik* menyatakan bahwa organisasi sektor publik yang menerapkan sistem pengukuran kinerja berbasis output dan outcome menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang hanya berorientasi pada serapan anggaran (Fadli, 2024). Hal ini relevan dengan kebutuhan reformasi manajemen kinerja di Sekretariat DPRD.

### **Efektivitas Dukungan terhadap Fungsi Pengawasan**

Pada fungsi pengawasan, Sekretariat DPRD menyediakan data, dokumentasi hasil rapat, serta administrasi kegiatan monitoring kebijakan daerah. Temuan menunjukkan bahwa dokumentasi formal telah tersedia, namun sistem pengarsipan dan akses data belum sepenuhnya terdigitalisasi dan terintegrasi. Dalam teori sistem organisasi dari Daniel Katz dan Robert L. Kahn (1978) organisasi dipandang Merupakan suatu sistem terbuka yang tersusun atas berbagai subsistem yang saling berinteraksi.. Ketika subsistem administratif (Sekretariat) belum optimal, maka subsistem legislasi (DPRD) ikut terdampak. Keterbatasan integrasi data dan dokumentasi berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.

Selain itu, tuntutan transparansi publik semakin meningkat. Tanpa sistem informasi yang responsif dan terdokumentasi secara baik, legitimasi kelembagaan dapat terpengaruh. Oleh karena itu, modernisasi sistem dokumentasi dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data menjadi aspek penting dalam memperkuat fungsi pengawasan. Menurut penelitian dalam *Jurnal Otonomi Daerah*, efektivitas fungsi DPRD sangat dipengaruhi oleh kualitas dukungan administratif dan koordinasi kelembagaan antara sekretariat dan perangkat daerah lainnya (Lestari & Hamzah, 2023). Dengan demikian, penguatan sistem koordinasi internal menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kelembagaan.

### **Analisis Peran Kelembagaan Sekretariat DPRD**

Dalam sistem pemerintahan daerah, Sekretariat DPRD berfungsi sebagai unsur pelayanan administratif dan teknis bagi lembaga legislatif. Secara normatif, fungsi tersebut ditegaskan dalam regulasi pemerintahan daerah yang mengatur dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Jika dianalisis melalui perspektif teori peran kelembagaan (*institutional role theory*), efektivitas organisasi dipengaruhi oleh kejelasan struktur kewenangan, profesionalisme aparatur, dan ketersediaan sumber daya. Perspektif Pendekatan institusional kontemporer menegaskan bahwa keberhasilan organisasi publik tidak sekadar bergantung pada prosedur formal, tetapi sangat ditentukan oleh kompetensi aktor serta kapasitas manusia dalam berinteraksi dukungan sistemik (Scott, 2014). Kepemimpinan yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang baik juga dikaitkan dengan prestasi kinerja pelayanan publik di pemerintahan lokal (Rizki & Kurniawan, 2023).

Berdasarkan temuan penelitian, struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni telah jelas secara formal dan sesuai dengan ketentuan regulatif. Namun demikian, profesionalisme aparatur meskipun dinilai cukup baik, masih memerlukan peningkatan kapasitas teknis, terutama dalam aspek analisis kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung menjadi faktor pembatas dalam mencapai efektivitas optimal. Dengan demikian, secara teoretik dapat ditegaskan bahwa efektivitas Sekretariat DPRD bersifat struktural-prosedural efektif, namun secara substantif-strategis belum maksimal, sehingga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni berperan vital sebagai fasilitator pelayanan teknis dan administratif, guna mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan yang dijalankan oleh DPRD. Dari sisi normatif, struktur organisasi dan pembagian tugas telah sejalan dengan ketentuan regulasi pemerintahan daerah. Akan tetapi, secara empiris masih dijumpai berbagai keterbatasan, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem informasi, serta penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja.

Dukungan administratif, fasilitasi teknis persidangan, pengelolaan dokumentasi, dan manajemen anggaran yang profesional terbukti menjadi faktor penentu kualitas kinerja DPRD. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan melalui reformasi manajemen kinerja, digitalisasi sistem administrasi, serta penguatan Public Financial Management (PFM) menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas lembaga legislatif daerah. Dengan demikian, Sekretariat DPRD tidak sekadar berfungsi sebagai unit administratif pendukung, melainkan sebagai elemen strategis dalam mewujudkan dan membangun manajemen pemerintahan daerah yang terbuka, melibatkan partisipasi publik, dan cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Christopher Hood. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69 (1), 3-19.
- Christopher Pollitt, & Geert Bouckaert. (2017). *Public management reform: A comparative analysis—Into the age of austerity (4th ed.)*. Oxford University Press.
- Daniel Katz, & Robert L. Kahn. (1978). *The social psychology of organizations (2nd ed.)*. Wiley.
- Fadli, M. (2024). Implementasi Manajemen Kinerja Berbasis Output Pada Organisasi Perangkat Daerah. *Jurnal Manajemen Publik*, 9 (1), 45-60.
- Hidayat, R., & Kurniawan, D. (2023). Penguatan Public Financial Management Dalam Mendukung Fungsi Pengawasan DPRD. *Jurnal Keuangan dan Kebijakan Publik*, 7 (2), 112-128.
- John W. Creswell. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.



- Lestari, A., & Hamzah, M. (2023). Sinergi Kelembagaan Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. *Jurnal Otonomi Daerah*, 15 (1), 77-92.
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Megah S, K. I., & Valiant S, R. (2025). Systematic literature review: Assessing the effectiveness of performance-based budgeting in government financial management. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 10 (1), 52-74.
- Michael Huberman, & Matthew B.Miles. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.
- Pratama, Y., & Widodo, J. (2021). Efektivitas organisasi sektor publik dalam perspektif kinerja. *Jurnal Administrasi Publik*, 17 (3), 233-247.
- Richard M. Steers. (1985). *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Goodyear Publishing Company.
- Rizki, T., & Kurniawan, S. (2023). Public Service Performance: Influence of Leadership and Governance On Public Service Performance. *Jurnal Bina Praja*, 15 (3), 443-452.
- Salamatul Afiyah. (2024). Performance measurement and evaluation in public sector organizations. *The Journal of Academic Science*, 1 (4), 100-112.
- Sari, D. (2022). Kapasitas kelembagaan dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19 (4), 321-335.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.